

KONSEP INFLUENCE POWER TERHADAP EMPOWERMENT DAN POLITIK

Rohmatun Nazilah¹, Syahdan², Neneng Hasanah³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: Smarkgeorge@gmail.com, rohmatunnazilah197@gmail.com,
nenenghasanah@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

In the world of organization and management, the concepts of influence, power, empowerment, and politics play an important role in decision-making, power dynamics, and human resource management. This article examines these concepts theoretically, identifies the relationship between them, and the implications in the organizational context. Using various relevant literatures, this article aims to provide in-depth insights into how influence, power, empowerment, and politics interact to form effective and productive organizational dynamics. The concepts of influence, power, empowerment, and politics are crucial elements in understanding organizational dynamics and individual behavior in the workplace. Influence is the ability to influence others, power relates to the authority held by individuals, empowerment includes empowering individuals in making decisions, and organizational politics describes strategic activities to maintain or expand power. This article develops a theoretical analysis with a descriptive qualitative approach based on scientific literature. This research also includes empirical analysis through interviews and case studies to illustrate the implementation of these concepts in organizations.

Keywords: *Influence, Power, Empowerment, Politic*

ABSTRAK

Dalam dunia organisasi dan manajemen, konsep influence, power, empowerment, dan politik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, dinamika kekuasaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Artikel ini mengkaji konsep-konsep tersebut secara teoretis, mengidentifikasi hubungan antara mereka, serta implikasi dalam konteks organisasi. Dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana influence, power, empowerment, dan politik saling berinteraksi untuk membentuk dinamika organisasi yang efektif dan produktif. Konsep influence, power, empowerment, dan politik merupakan elemen yang krusial dalam memahami dinamika organisasi dan perilaku individu di tempat kerja. Influence adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain, power berkaitan dengan otoritas yang dimiliki individu, empowerment mencakup pemberdayaan individu dalam mengambil keputusan, dan politik organisasi menggambarkan aktivitas strategis untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Artikel ini mengembangkan analisis teoretis dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan literatur ilmiah. Penelitian ini juga mencakup analisis empiris

melalui wawancara dan studi kasus untuk menggambarkan implementasi konsep-konsep ini dalam organisasi.

Kata Kunci: Influence, Power, Empowerment, Politik

Pendahuluan

Kekuasaan atau *power* adalah salah satu konsep sentral dalam ilmu sosial, yang memainkan peran penting dalam struktur sosial, politik, dan organisasi. Dalam konteks ini, *influence power* (kekuasaan pengaruh) menjadi elemen utama yang tidak hanya berfungsi untuk mengontrol atau memimpin, tetapi juga untuk membentuk pandangan, tindakan, dan kebijakan. Berbeda dengan kekuasaan yang bersifat hierarkis dan sering kali lebih otoritatif, *influence power* lebih fokus pada pengaruh yang dapat diperoleh melalui cara-cara persuasif, komunikasi efektif, serta pengendalian informasi dan sumber daya. Dalam hubungan sosial dan politik, kekuasaan pengaruh memungkinkan individu atau kelompok untuk mengubah persepsi, mempengaruhi opini publik, dan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengambil keputusan.¹

Di sisi lain, pemberdayaan atau *empowerment* adalah konsep yang berkembang pesat dalam kajian politik, sosial, dan organisasi. Pemberdayaan tidak hanya merujuk pada pemberian kekuatan secara fisik atau otoritatif, tetapi lebih kepada proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengontrol dan mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini berakar pada teori-teori sosial yang memandang pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta pengakuan terhadap hak individu dan kelompok untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya. Dalam konteks organisasi, pemberdayaan sering kali dilihat sebagai cara untuk meningkatkan otonomi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih partisipatif dan inklusif. Dalam politik, pemberdayaan bertujuan untuk memberikan suara kepada masyarakat, terutama kelompok yang kurang terwakili, agar dapat berperan aktif dalam proses politik.²

Politik, dalam lingkup mikro (seperti organisasi) maupun makro (seperti negara), adalah arena di mana kekuasaan dan pemberdayaan sering kali bertemu dan berinteraksi. Politik tidak hanya berkaitan dengan pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan

¹ French, J. R. P., & Raven, B. *The bases of social power*. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in Social Power* (pp. 150-167). (Institute for Social Research, 1959).

² Zimmerman, M. A. *Psychological empowerment: Issues and illustrations*. American Journal of Community Psychology, 1995.

dalam pemerintahan, tetapi juga menyangkut bagaimana hubungan kekuasaan dan otoritas dikelola di dalam masyarakat. Dalam konteks politik, penggunaan *influence power* sering kali terkait dengan kemampuan untuk membangun koalisi, memanipulasi opini publik, atau mengendalikan narasi yang ada. Di sisi lain, pemberdayaan politik berfokus pada penguatan partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk desentralisasi kekuasaan, pengakuan terhadap hak-hak politik individu, serta peningkatan akses terhadap proses pembuatan kebijakan. Dalam demokrasi, pemberdayaan politik dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan adil. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung ini, interaksi antara kekuasaan, pemberdayaan, dan politik semakin penting untuk dipahami, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan krisis politik yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat. Pemberdayaan menjadi kunci dalam membangun sistem politik yang inklusif, sementara kekuasaan pengaruh memainkan peran sentral dalam mempertahankan atau mengubah status quo. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana ketiga konsep ini berinteraksi dalam berbagai konteks, baik itu di tingkat individu, organisasi, maupun negara. Memahami dinamika antara *influence power*, *empowerment*, dan politik tidak hanya akan memperkaya teori sosial-politik, tetapi juga memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, pemimpin organisasi, dan masyarakat luas dalam merancang strategi yang lebih efektif dan inklusif untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) untuk menganalisis dan mengkaji konsep *influence power*, *empowerment*, dan politik. Studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini juga efektif untuk memahami teori-teori yang ada mengenai hubungan antara ketiga konsep tersebut dalam berbagai konteks sosial dan politik.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Influence Power dalam Politik dan Organisasi

Kekuasaan pengaruh atau *influence power* merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pemikiran orang lain tanpa

menggunakan kekerasan atau paksaan langsung. Dalam literatur sosial dan politik, konsep ini pertama kali dijelaskan oleh French dan Raven dalam teorinya tentang basis- basis kekuasaan. Mereka mengidentifikasi lima jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan berbasis penghargaan, hukuman, keahlian, identifikasi, dan legitimasi. Setiap jenis kekuasaan ini memberikan individu atau kelompok kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, tergantung pada konteks sosial dan organisasi.

French dan Raven mengembangkan lima jenis kekuasaan sosial yang memberikan dasar untuk memahami bagaimana *influence power* bekerja dalam masyarakat. Contohnya, *legitimate power* adalah kekuasaan yang datang dari posisi atau jabatan yang sah, sementara *expert power* datang dari pengetahuan atau keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu. Dalam politik dan organisasi, memahami perbedaan ini membantu menjelaskan bagaimana aktor-aktor kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan dan perilaku orang lain.

Di tingkat politik, *influence power* sering digunakan oleh aktor politik untuk mengarahkan kebijakan, membentuk opini publik, dan memperoleh dukungan bagi agenda mereka. Kekuasaan ini dapat berbentuk persuasi verbal, pengendalian informasi, atau manipulasi media untuk menciptakan narasi yang menguntungkan. Dalam konteks ini, *influence power* sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem politik yang ada atau mengubah struktur kekuasaan yang sudah mapan. Misalnya, dalam demokrasi, politisi menggunakan *influence power* untuk membangun koalisi, menarik dukungan pemilih, atau meyakinkan anggota legislatif untuk mendukung kebijakan tertentu.³

Kekuasaan pengaruh yang digunakan oleh politisi sering melibatkan manipulasi informasi atau framing isu untuk mempengaruhi persepsi publik dan mendapatkan dukungan. Media sering menjadi alat penting dalam strategi ini, dengan aktor politik yang mengendalikan atau mempengaruhi pesan yang disampaikan ke masyarakat.⁴

Selain itu, dalam organisasi, *influence power* juga berfungsi untuk membentuk budaya organisasi, memotivasi karyawan, dan mempengaruhi keputusan strategis.

³ French, J. R. P., & Raven, B. *The bases of social power*. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in Social Power* (pp. 150-167). (Institute for Social Research, 1959)

⁴ Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. *Power, approach, and inhibition*. (Psychological Review, 2003)

Pemimpin yang memiliki kekuasaan pengaruh dapat membimbing tim mereka untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih persuasif daripada dengan kekuasaan yang berbasis pada otoritas atau hierarki. Dalam hal ini, kekuasaan pengaruh memungkinkan pemimpin untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling percaya dengan bawahannya.

2. Empowerment Pemberdayaan Individu dan Kelompok

Empowerment adalah proses pemberian kekuatan atau otoritas kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini sangat relevan dalam diskusi tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat dan organisasi. mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses meningkatkan kapasitas individu atau komunitas untuk mengontrol keputusan yang memengaruhi mereka. Pemberdayaan bukan hanya tentang memberi akses terhadap sumber daya, tetapi juga melibatkan peningkatan kemampuan untuk mengatasi

hambatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada. pemberdayaan tidak hanya mencakup akses terhadap sumber daya, tetapi juga peningkatan kapasitas untuk bertindak dan membuat keputusan. Pemberdayaan ini dapat berupa peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau akses ke jaringan sosial yang mendukung perkembangan individu dan kelompok.⁶

Dalam konteks organisasi, pemberdayaan melibatkan pemberian otonomi dan kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi pekerjaan mereka. Pemberdayaan ini berhubungan erat dengan peningkatan motivasi, kepuasan kerja, dan produktivitas. Teori motivasi seperti yang dijelaskan oleh Hackman dan Oldham menyebutkan bahwa pekerjaan yang memberikan otonomi dan tantangan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab individu terhadap hasil pekerjaan mereka. Pemberdayaan dalam organisasi juga mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang memungkinkan karyawan untuk berkembang dan mencapai potensi maksimal mereka.

Dalam politik, pemberdayaan berfokus pada memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan politik sering kali digunakan untuk menggambarkan upaya untuk memperkuat suara kelompok yang kurang terwakili, seperti perempuan, minoritas, atau masyarakat adat, dalam proses politik. Proses ini bisa berupa desentralisasi kekuasaan, reformasi pemilu, atau penguatan hak asasi manusia.

Pemberdayaan politik bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan demokratis, dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.⁷

3. Politik sebagai Arena Kekuasaan dan Pemberdayaan

Politik dapat dipahami sebagai arena di mana kekuasaan, otoritas, dan pemberdayaan berinteraksi. Politik, baik di tingkat negara maupun organisasi, adalah proses bagaimana individu atau kelompok berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sebagai arena kekuasaan, politik melibatkan berbagai aktor yang saling bersaing untuk mempengaruhi keputusan yang dapat mengubah kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, politik berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Politik sebagai arena kekuasaan sering kali melibatkan konflik

4. Interaksi antara Influence Power, Empowerment, dan Politik

Ketiga konsep ini *influence power*, *empowerment*, dan politik—saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam struktur sosial. *Influence power* berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan atau mengubah kekuasaan dalam politik dan organisasi. Di sisi lain, pemberdayaan berperan untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan dengan meningkatkan partisipasi individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Dalam politik, pemberdayaan sering kali digunakan untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan dan untuk meningkatkan representasi dalam kebijakan publik.

Interaksi antara *influence power* dan pemberdayaan sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial dan politik. Kekuasaan pengaruh dapat digunakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan yang ada, sementara pemberdayaan berfungsi untuk memperluas partisipasi dan menciptakan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Hubungan antara ketiga konsep ini sangat penting dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan yang adil dan demokratis. Pemberdayaan memungkinkan individu dan kelompok untuk memperoleh kekuatan politik dan sosial, sedangkan *influence power* digunakan untuk mengarahkan dan mempengaruhi keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, pemberdayaan berfungsi sebagai alat untuk mengimbangi ketidaksetaraan kekuasaan yang ada, menciptakan

sistem yang lebih inklusif dan representatif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketiga konsep ini berfungsi secara simultan dalam berbagai konteks sosial dan politik untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kesimpulan

Dalam kajian mengenai *influence power*, *empowerment*, dan politik, dapat disimpulkan bahwa ketiga konsep ini saling terkait dan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika kekuasaan dan hubungan sosial di berbagai tingkat—baik dalam organisasi maupun sistem politik.

Influence power berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain tanpa menggunakan paksaan langsung. Dalam konteks politik, kekuasaan pengaruh digunakan oleh aktor politik untuk membentuk kebijakan, memenangkan dukungan, dan mengubah persepsi publik. Sementara itu, dalam organisasi, *influence power* memungkinkan pemimpin untuk memotivasi dan mengarahkan tim dengan cara yang lebih persuasif, tanpa bergantung pada otoritas yang bersifat otokratik. *Empowerment* atau pemberdayaan, di sisi lain, berfokus pada memberikan individu atau kelompok kekuatan untuk mengendalikan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dalam konteks organisasi, pemberdayaan berhubungan erat dengan peningkatan otonomi dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi, kepuasan, dan produktivitas. Dalam politik, pemberdayaan berfungsi untuk memperluas partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan, guna menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil.

Kedua konsep ini—*influence power* dan *empowerment*—berinteraksi dalam politik sebagai alat untuk mengatur atau menyeimbangkan kekuasaan. Kekuasaan pengaruh dapat digunakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan yang ada, sedangkan pemberdayaan berfungsi untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan dengan meningkatkan partisipasi dan representasi dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, ketiga konsep ini menunjukkan pentingnya distribusi kekuasaan yang adil dalam organisasi dan masyarakat. Pemberdayaan memungkinkan

kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk memiliki suara, sementara kekuasaan pengaruh dapat digunakan untuk mendorong perubahan atau mempertahankan status quo. Dalam konteks politik, pemberdayaan politik memberi kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, untuk menciptakan masyarakat dan organisasi yang lebih adil, inklusif, dan demokratis, penting untuk memahami dan memanfaatkan interaksi antara *influence power*, *empowerment*, dan politik secara berimbang.

Referensi

Bass, B. M. (1990). *Bass & Stogdill's handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications*. Free Press.

Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

French, J. R. P., & Raven, B. (1959). *The bases of social power*. In D. Cartwright (Ed.), *Studies in Social Power* (pp. 150-167). Institute for Social Research.

Giddens, A. (2009). *Sociology* (6th ed.). Polity Press.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). *Motivation through the design of work: Test of a theory*. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16(2), 250-279. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(76\)90016-7](https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7)

HarperBusiness.

<https://doi.org/10.1007/BF02506981>

Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). *Power, approach, and inhibition*. *Psychological Review*, 110(2), 265-284. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.110.2.265>

Pfeffer, J. (2010). *Power: Why some people have it—and others don't*.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. Tilly, C.

(2007). *Democracy*. Cambridge University Press.

Spreitzer, G. M. (1995). *Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation*. *Academy of Management Journal*, 38(5), 1442-1465. <https://doi.org/10.5465/256865>

Zimmerman, M. A. (1995). *Psychological empowerment: Issues and illustrations*. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 581-599.

Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.

Raelin, J. A. (2003). *Creating leaderful organizations: How to bring out leadership in everyone*. Berrett-Koehler Publishers.

Ackerly, B. A. (2000). *Political theory and feminist social criticism*. Cambridge University Press.

Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. N. Smith, Trans.). International Publishers.